

**TANAH UNTUK PENGGARAP?
PENGUASAAN TANAH DAN STRUKTUR AGRARIS DI BEBERAPA DESA
PENGHASIL PADI**

Ricky Ardian Harahap¹

Aprilia Ambarwati²

Abstract

This study describes the patterns of land control and agrarian structure in 12 rice-producing villages in Indonesia. It also explores the relationship between landholding, farm and non-farm incomes. The apparent drastic decline in numbers of small farms in the 2013 Agricultural Census is probably caused by changing definitions of 'farm', and does not apply to the small-scale food production sector. Inequality of landholding in some villages is alarming in terms of social efficiency and approaches polarization. Large-scale land ownership, however, does not lead to large-scale farming; large landowners tend to allocate their land in small parcels to tenants in share-cropping (or, less commonly, rental) arrangements. Speculative investment in land is one cause of rapidly rising prices of agricultural land. Young people and women have limited access to land. Classic agrarian studies assumes that land tenure is the main determinant of capital accumulation in farm households. However, this study found much variation in agrarian structures because of the dynamics of agricultural and non-agricultural employment and incomes

Keywords: *Small-scale rice farming, Agrarian structure, Land tenure, Land ownership, Capital accumulation, Indonesia*

¹ Peneliti Pusat Analisis Sosial Akatiga

² Peneliti Pusat Analisis Sosial Akatiga

Pendahuluan

Latar Belakang Penelitian

Struktur agraris sektor pangan yang didominasi oleh ‘petani kecil’ bukan sesuatu yang homogen, merata, atau statis. Data makro (terutama Sensus Pertanian) dan berbagai studi mikro menunjukkan adanya heterogenitas besar dalam pola pemilikan dan penguasaan tanah antardaerah, sedangkan berbagai penelitian mikro menunjukkan adanya pola diferensiasi agraris (yaitu diferensiasi masyarakat tani antara petani pemilik tanah luas, petani pemilik sedang, petani bukan-pemilik, dan buruh tani yang tak bertanah). Dari berbagai sumber data makro maupun mikro terlihat juga dinamika perubahan pola penguasaan atas tanah dan diferensiasi dari waktu ke waktu.³

Ketimpangan struktur penguasaan tanah tidak sehat dari berbagai segi. Selain mengancam kelangsungan produksi pangan, terdapat kecenderungan buruk pada penyebaran kesempatan kerja, distribusi pendapatan dan aspek-aspek lain dari ‘efisiensi sosial’ sektor pertanian, serta ekonomi perdesaan.⁴

Berbagai negara penghasil padi di Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan berhasil melakukan *land reform* dengan hasil yang sangat nyata bagi produktivitas, pemerataan, maupun dinamika sektor pertanian dan non pertanian. Keberhasilan tersebut berciri positif pada tingginya kesejahteraan petani di negara-negara tersebut. Kebijakan redistribusi tanah pertanian di negara-negara ini telah berhasil menghancurkan hak monopoli dari para tuan tanah (*landlords*), membatasi luas pemilikan dengan ketat, dan membuat petani yang tadinya sebagai penyewa menjadi pemilik tanah.

Di Indonesia, pembatasan luas pemilikan tanah seperti termuat dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA 1960)⁵ belum diterapkan hingga saat ini karena dinamika politik yang tidak memungkinkan. Masa pemerintahan Orde Baru lebih memprioritaskan pelaksanaan ‘Revolusi Hijau’ sebagai upaya untuk meningkatkan produksi beras, tanpa usaha yang berarti untuk mengendalikan proses diferensiasi dalam penguasaan lahan yang lazim terjadi sejalan dengan komersialisasi pertanian.

³ Bachriadi dan Wiradi 2011; White dan Wiradi 1989

⁴ Lipton 2009

⁵ Memuat prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial, berarti harus diperlakukan sebagai alat produksi untuk menciptakan keadilan sosial, tidak untuk kepentingan individu yang menyebabkan konsentrasi kepemilikan dan eksploitasi “kaum yang lemah oleh kaum yang kuat”. UUPA antara lain membatasi luas pemilikan (dengan luas maksimal disesuaikan dengan kondisi lokal), mengatur ketentuan bagi hasil antara pemilik dan penggarap, dan membatasi pemilikan tanah oleh *absentee*.

Salah satu konsekuensi dari kebijakan agraria tersebut adalah produksi pangan Indonesia saat ini mengandalkan suatu struktur agraris yang belum terkena reformasi. Distribusi penguasaan tanah pada desa-desa di Indonesia berbeda satu sama lain dan memiliki polanya masing-masing. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola dan dinamika penguasaan tanah di desa-desa penghasil padi?
2. Bagaimana hubungan kerja serta akses berdasar gender dan generasi dalam penguasaan tanah di desa-desa penghasil padi?
3. Bagaimana hubungan timbal-balik antara ketimpangan di sektor pertanian dan non pertanian di desa-desa penghasil padi?

Penelitian mengenai struktur agraris dan penguasaan tanah merupakan bagian dari penelitian utama AKATIGA dengan tema Kemandirian Pangan. Dinamika struktur penguasaan tanah pada desa-desa penghasil padi perlu dilihat dalam konteks kemandirian pangan di Indonesia. Selama ini pangan di Indonesia disediakan oleh pertanian skala kecil yang tersebar di berbagai desa penghasil padi. Namun, kecenderungan penguasaan tanah oleh sebagian kecil kelompok orang kuat telah mengancam kemandirian pangan karena mengarah kepada penurunan produktivitas, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan berkurangnya serapan tenaga kerja pertanian padi.⁶ Penguasaan tanah yang tidak merata juga rentan terhadap alih fungsi lahan sehingga dapat mempengaruhi produksi pangan. Dengan demikian penguasaan tanah yang tidak merata dapat meningkatkan kemiskinan di perdesaan.

⁶ Analisis efisiensi sosial pada pertanian padi skala kecil dapat dibaca dalam artikel “ *Sistem Pertanian Padi Indonesia dalam Perspektif Efisiensi Sosial*, dalam edisi JAS ini (Herlinawati dan Charina, 2015).

Kerangka Pemikiran

Dalam mengurai masalah penguasaan tanah dan struktur agraris pada desa-desa penghasil padi, digunakan beberapa konsep untuk mempermudah analisis⁷:

1. **Konsep ‘akses’ dalam konteks studi penguasaan lahan⁸**, digunakan untuk memperhatikan seperangkat hubungan yang lebih luas daripada hanya hubungan kepemilikan. Sesuai dengan pandangan ini, ‘penguasaan lahan’ dalam konteks studi ini dipahami sebagai jangkauan terhadap tanah untuk dikelola yang tidak hanya bisa diperoleh dengan jalan memiliki, namun dapat pula melalui cara sewa, gadai, atau bagi hasil
2. **Konsep diferensiasi agraris (*agrarian or rural differentiation*)**, digunakan untuk mempermudah melakukan analisis ‘kelas’ petani. Dalam menjelaskan struktur agraris, studi ini menggunakan enam kategori kasar untuk membedakan petani di desa penelitian, yaitu Petani Modal Kuat (CF), Petani Luas (LF), Petani Menengah I (MF1), Petani Menengah II (MF2), Petani Sempit (SF), dan Buruh Tani Tak Bertanah (LL).⁹
3. **Konsep rejim ketenagakerjaan agraris (*agrarian labour regime*)**, digunakan untuk memahami struktur agraris dan penguasaan tanah Konsep ini menyangkut hubungan ketenagakerjaan dan jalur-jalur peralihan surplus dalam sistem produksi pertanian. Bernstein melihat struktur sosial sistem produksi dan sistem reproduksi dengan mengandalkan empat pertanyaan pokok, yaitu siapa yang memiliki apa “*who owns what?*” (penguasaan), siapa yang melakukan apa “*who does what?*” (pembagian kerja), dan siapa yang mendapatkan apa “*who gets what?*” (rejim ketenagakerjaan dan pola arus peralihan nilai), dan apa yang dilakukan dengan pendapatan tersebut “*what do they do with it?*” (pola reproduksi/akumulasi).¹⁰
4. **Interaksi akses dan kegiatan pertaniandan non pertanian dalam proses akumulasi dan diferensiasi sosial-ekonomi masyarakat desa.** *Inequality* perdesaan saat ini lebih bernuansa dan lebih dinamis, tidak hanya berdasarkan penguasaan atas tanah.¹¹

⁷ White, 2015

⁸ Peluso dan Ribot mendefinisikan konsep akses sebagai “kemampuan untuk menikmati manfaat dari sesuatu” (*the ability to benefit from things*).

⁹ Dalam pembahasan grafik total pendapatan RTP pada bagian akhir, strata petani ini juga ditulis sebagai berikut: Petani Modal Kuat = CF (Capital Farmer), Petani Luas > 2 ha (Large Farm), Petani Menengah I antara 1-2 ha (Medium Farm I), Petani Menengah II antara 0,25-0,99 ha (Medium Farm II), Petani Sempit < 0,25 ha (Small Farm), dan Buruh Tani tak Bertanah = LL (Landless).

¹⁰ Bernstein 2010: 22-25

¹¹ De Konincke et al 2012

Meskipun porsi sektor pertanian menurun dengan adanya semua perkembangan ini¹², namun pertanian masih merupakan sektor dan pemberi lapangan kerja yang paling besar, dan menjadi unsur penting dalam proses diferensiasi sosial ekonomi.

5. Terakhir, **efisiensi sosial** digunakan untuk membantu menganalisis secara tajam bentuk-bentuk efisiensi ekonomi dan sosial pada distribusi penguasaan lahan pertanian skala kecil. Dalam konteks Indonesia masa kini, tercapainya efisiensi sosial dalam sektor pertanian pangan memerlukan beberapa prasyarat, yaitu (1) mendukung peningkatan produksi, (2) memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dan menyediakan mata pencaharian, (3) mendukung distribusi pendapatan yang lebih baik, (4) mendukung keberlanjutan lingkungan (White, 2013).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dua belas desa penelitian yang tersebar pada enam kabupaten di tiga provinsi dengan menggunakan *mixed methods*, kualitatif dan kuantitatif. Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan cara observasi, transek, diskusi kelompok, *Focus Group Discussion* (FGD), dan wawancara mendalam. FGD dan wawancara mendalam dilakukan bersama aparat desa dan perwakilan petani dari masing-masing strata. Sementara transek digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai desa dan struktur pertanian di desa sebelum melakukan wawancara mendalam. Pengambilan data kuantitatif menggunakan data BPS (Sensus Pertanian), beberapa data statistik tingkat lokal, dan survei kecil dengan sampel 30 Rumah Tangga Pertanian (RTP) yang secara kasar mencerminkan keberagaman struktur agraris di masing-masing desa penelitian. Dasar analitik tulisan ini lebih banyak menggunakan survey terhadap 30 RTP pada 12 desa penelitian.

Penelitian di lapangan dilakukan selama kurang lebih 14 hari untuk setiap desa dengan empat peneliti lapangan, sehingga menjadi sekitar 54 HOK di masing-masing desa. Dalam penelitian di lapangan, cukup sulit untuk mendapatkan data luas kepemilikan tanah dan pendapatan RTP yang akurat. Beberapa pendekatan dilakukan seperti melakukan pemeriksaan salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan wawancara kepada aparat desa terkait.¹³ Sementara pencarian data terkait pendapatan RTP menggunakan

¹² *ibid*, p. 32

¹³ Data kepemilikan tanah dari SPPT, walaupun tidak 100% akurat, menggambarkan kepemilikan tanah di dalam desa.

mendekatan dengan melakukan perhitungan ulang pendapatan bersih setelah dikurangi biaya produksi masing-masing sektor.

Tulisan ini menyajikan 4 bagian, bagian pertama menjelaskan pendahuluan tulisan. Bagian kedua menjelaskan penguasaan tanah dan struktur agraris melalui perbandingan olahan data sekunder dan data primer. Bagian ketiga membahas mengenai pemilikan dan penguasaan lahan serta akses tanah berdasarkan generasi dan gender. Bagian keempat merupakan pembahasan mengenai hubungan timbal balik antara ketimpangan di sektor pertanian dan non pertanian. Tulisan ini akan ditutup dengan rangkuman dan rekomendasi pada bagian kelima.

PENGUASAAN TANAH DAN STRUKTUR AGRARIS

Bagian ini terlebih dulu akan mengulas secara singkat data-data sekunder (olahan) Sensus Pertanian 2003-2013 yang berkaitan dengan penguasaan tanah dan struktur agraris. Pembahasan mengenai data sekunder bertujuan memberikan gambaran penguasaan tanah dan struktur agraris di Indonesia, sebelum dibandingkan dengan data temuan lapangan pada dua belas desa penelitian.

Penguasaan Tanah dan Struktur Agraris menurut Data Sekunder

Perbandingan data Sensus Pertanian BPS dari tahun 1963-2003 menunjukkan jumlah RTP terus mengalami peningkatan seiring laju pertumbuhan penduduk. Jumlah petani gurem terus meningkat mulai dari periode 1983-1993 hingga 1993-2003, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 di bawah¹⁴:

¹⁴ Wiradi dan Bachriadi 2011

Tabel 1. Perubahan RTP yang Menguasai Tanah, tahun 1963-2003

Tahun Sensus	Jumlah RTP yang menguasai tanah (000.000)	Total tanah yang dikuasai (000.000 ha)	Rata-rata penguasaan tanah (ha)	% “petani gurem” (penguasaan <0.5ha)	% peningkatan jumlah RTP yang menguasai tanah antara dua sensus	% peningkatan luas tanah pertanian antara dua sensus
1963	12,2	12,9	1,05	44		
1973	14,4	14,2	0,99	46	18	10
1983	18,8	16,8	0,89	45	31	18
1993	21,2	17,1	0,81	49	13	2
2003	24,3	21,5	0,89	51	15	26

Sumber: Bachriadi dan Wiradi (2011:22), berdasarkan data Sensus Pertanian 1963-2003

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah RTP penguasa tanah yang meningkat tidak diimbangi dengan meningkatnya ketersediaan tanah, kecuali pada periode 1993-2003. Terjadi peningkatan total luas tanah yang dikuasai namun dalam periode 1973-1993 kenaikan tersebut lebih kecil dibandingkan kenaikan jumlah petani yang menguasai tanah. Dengan demikian, persentase petani yang menguasai tanah kurang dari 0,5 ha semakin meningkat (lihat kolom 5). Bachriadi dan Wiradi (2011) menjelaskan bahwa fenomena tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang antara kota dengan desa serta proses industrialisasi yang tidak mengakar dan tumbuh di perdesaan sehingga menyebabkan penduduk di perdesaan meninggalkan sektor pertanian.

Sementara menurut ST2013, jumlah RTP terutama rumah tangga petani gurem di Indonesia menurun secara drastis dalam waktu 10 tahun terakhir, sehingga timbul pertanyaan apakah penurunan itu mencerminkan perubahan yang nyata, ataukah lebih mencerminkan perubahan dalam proses pengumpulan atau pengolahan data?

Tabel 2 Jumlah RTP menurut Golongan Luas Tanah yang dikuasai berdasarkan ST2003 dan ST2013

No	Golongan Luas Tanah (ha)	ST2003 (dalam juta)	ST2013 (dalam juta)	Perubahan	
				Absolut	%
1	<0.1	9.38	4.34	-5.04	-53.75
2	0.10 – 0.19	3.60	3.55	-0.05	-1.45
3	0.20 – 0.49	6.82	6.73	-0.08	-1.23
4	0.5 – 0.99	4.78	4.55	-0.23	-4.76
5	1.0 – 1.9	3.66	3.73	0.7	1.76
6	2.0 – 2.9	1.68	1.62	-0.55	-3.27
7	≥3.0	1.31	1.61	0.30	22.81
Jumlah		31.23	26.14	- 5.10	-16.32

Sumber: Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013

Dalam pandangan kami, banyak perubahan yang jelas mungkin dikarenakan oleh perubahan definisi dan kriteria yang digunakan oleh BPS. Dari berbagai publikasi sensus pada tahun 2003 dan 2013 sulit untuk melihat definisi yang sama persis, yang telah digunakan dalam pembuatan tabel di atas. Sangat penting bahwa hal ini perlu mendapatkan klarifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan menarik kesimpulan yang menyesatkan untuk kebijakan. Namun, terjadi penurunan yang signifikan pada sektor hortikultura bukan pada sektor pertanian padi (yang tampaknya mengalami penurunan sebesar 6,34 juta atau 37 persen). Sementara, penurunan pada sektor pertanian padi hanya 0,4 persen atau 58 ribu rumah tangga di 10 tahun. Sektor pertanian padi tidak menyumbang jumlah penurunan RTP yang signifikan.¹⁵

Bachriadi dan Wiradi (2011) telah melihat dinamika penguasaan lahan seperti dapat dilihat dari tabel di bawah:

Tabel 3. Distribusi Petani Pengguna Lahan dan Status Penggarapannya, 1963-2003

Status	1963 (%)	1973 (%)	1983 (%)	1993 (%)	2003 (%)
Petani Pemilik	64,1	74,7	69,3	71,7	70,5
Petani Pemilik dan Penggarap	29,1	22,1	25,3	24,5	26,1
Petani Penggarap Murni	6,8	3,2	5,4	3,8	3,4
Total	100	100	100	100	100

Sumber: Bachriadi dan Wiradi (2011: 30)

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa jumlah petani bukan pemilik atau petani penggarap murni sangat kecil di bawah 5%. Persentase jumlah pemilik yang juga menggarap tanah milik orang lain cukup besar yaitu sekitar 25%. Penurunan jumlah petani penggarap

¹⁵ Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013

murni dari tahun 1983-2003 menunjukkan ketidakmerataan distribusi penguasaan tanah bahkan terdapat kecenderungan semakin timpangnya distribusi penguasaan tanah. Penurunan jumlah petani penggarap murni dari tahun 1983-2003 menunjukkan kecenderungan meningkatnya jumlah buruh tani tak bertanah yang dianggap memberikan sumbangan terhadap makin tajamnya ketimpangan struktur penguasaan tanah.

Penguasaan Tanah dan Struktur Agraris Menurut Data Primer

Pola penguasaan dan kepemilikan tanah yang ada di 12 desa memiliki variasi yang menarik. Terdapat dua desa (Cisari di Karawang dan Walian di Sulawesi Selatan) yang memiliki kecenderungan polarisasi kepemilikan dan penguasaan. Berikut adalah tabel estimasi persentase status penguasaan tanah yang ada di 12 desa.

Tabel 4. Estimasi Penyebaran RTP menurut Jenis Penguasaan pada 12 Desa Penelitian (% dari Semua Rumah tangga)

Desa	Jenis Penguasaan (%)			
	Petani Pemilik	Petani Pemilik Penggarap	Petani Penggarap	Buruh Tani
Cisari (Karawang)	9	15	36	40
Dawungan (Karawang)	10	25	27	38
Karang (Indramayu)	32	29	15	24
Wanakerta (Indramayu)	17	32	24	27
Sidosari (Kebumen)	40	20	30	10
Mulyoharjo (Kebumen)	30	20	20	30
Wetanan (Cilacap)	60	15	15	10
Sarimulyo (Cilacap)	35	25	20	20
Walian (Wajo)	15	25	59	1*
Parangputih (Wajo)	30	40	15	15
Cempaka (Bone)	75	15	5	5
Gadingan (Bone)	80	9	10	1

Sumber: Monografi Desa, estimasi FGD, data sekunder BP3K

*: angka 1 menunjukkan jumlah yang tidak signifikan

Berdasarkan Tabel 4 di atas diketahui bahwa di kebanyakan desa (9 diantara 12 desa) jumlah petani yang tidak memiliki (sebagian atau seluruh) tanahnya melebihi jumlah petani pemilik murni. Penguasaan tanah di Cisari, Dawungan, dan Walian terpusat pada beberapa petani pemilik saja yaitu masing-masing sebesar 9%, 10%, dan 15%. Sementara penguasaan lahan oleh petani pemilik di Gadingan mencapai 80%, Cempaka 75%, dan Wetanan mencapai 60%. Lebih dari separuh petani pemilik di Cisari merupakan *absentee* yang tinggal

di luar kabupaten. Sisanya (30%) merupakan petani lokal keturunan tuan tanah. Strata buruh tani tak bertanah terbesar terdapat pada desa-desa di Jawa Barat.

Strata penguasaan tanah di antara 30 RTP sampel di 12 desa disajikan pada tabel di bawah. Jumlah buruh tani tak bertanah paling besar terdapat di Wanakerta, yaitu sebanyak 60%. Pada tiga desa lainnya di Jawa Barat jumlah buruh tani sebanyak 40%. Berbeda dengan yang terjadi di Gadingan, jumlah buruh tani tak bertanah di desa ini tidak signifikan hanya sebesar 1%. Di Walian dan Cempaka jumlah buruh tani tak bertanah sebesar 7%, dan di Sarimulyo sebesar 5%. Sedangkan persentase buruh tak bertanah di Wetanan, Sidosari, Cempaka, dan Gadingan tidak besar jika dibandingkan dengan desa-desa lain karena mereka memiliki kesempatan mengelola usaha tani dengan cara menyewa atau bagi hasil.

Tabel 5. Persentase Sampel 30 RTP berdasarkan Strata Penguasaan Tanah pada 12 Desa Penelitian

Desa	Strata Penguasaan ¹⁶				
	Petani Luas	Petani Menengah I	Petani Menengah II	Petani Sempit	Buruh Tani tak Bertanah
Cisari	3	6	15	36	40
Dawungan	15	30	10	5	40
Karang	10	15	30	5	40
Wanakerta	5	10	10	15	60
Sidosari	3	7	30	46	10
Mulyoharjo	0	13	27	40	20
Wetanan	5	16	21	37	21
Sarimulyo	11	16	26	42	5
Walian	36	46	11	0	7
Parangputih	14	34	21	10	21
Cempaka	3	57	33	0	7
Gadingan	0	27	62	10	1

Sumber: Data Kuesioner dengan sampel 30 RTP. Sampel dipilih untuk mencerminkan struktur (menurut estimasi) penguasaan lahan di masing-masing desa.

Berdasarkan uraian tabel di atas tergambar bahwa rata-rata penguasaan tanah di seluruh desa berada pada sebagian kecil petani (polarisasi). Terutama Cisari dan Walian menunjukkan tingkat polarisasi yang relatif tinggi. Namun, pada umumnya tanah yang dimiliki oleh seorang pemilik luas dikerjakan oleh beberapa petani penggarap (pemaro).

¹⁶ Dalam penelitian ini terdapat 6 strata petani, yaitu Petani Modal Kuat, Petani Luas, Petani Menengah I, Petani Menengah II, Petani Sempit, dan Buruh Tani tak Bertanah. Dalam penyajian tabel ini tidak menyertakan Petani Modal Kuat karena proporsinya tidak signifikan. Pada masing-masing desa, sampel Petani Modal Kuat hanya 1-3 orang saja.

Dengan demikian, kepemilikan tanah luas tidak menimbulkan usaha tani luas. Berdasarkan struktur penguasaan, pengambilan keputusan mengenai keberlanjutan pengelolaan tanah garapan sangat tergantung pada pemilik lahan. Pemilik lahan sewaktu-waktu dapat mengambil alih pengelolaan tanah tersebut. Dampak lebih jauh dari kecenderungan konsentrasi penguasaan tanah adalah kecenderungan kemampuan “*value capture*” (peralihan nilai dari golongan satu ke golongan lain) yang terjadi pada segelintir orang saja yang menguasai tanah di desa.

Proporsi petani bukan pemilik di 12 desa jauh lebih tinggi dari apa yang ditangkap dalam data makro (bandingkan data BPS dalam Tabel 3 diatas). Hal penting lainnya adalah tingkat kepincangan dalam penguasaan tanah tidak berbanding lurus dengan sempit/luasnya lahan yang tersedia pada masing-masing desa. Luas lahan yang tersedia pada masing-masing desa bisa saja hanya dikuasai oleh sebagian kecil orang atau kelompok tertentu.

PEMILIKAN DAN PENGUASAAN LAHAN

Pemilik Lahan Luas: Lokal maupun *Absentee*

Pemilikan lahan luas di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan menunjukkan variasi. Tanah di Cisari (70%) banyak dimiliki oleh *absentee* yang tinggal di luar Karawang, seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Bandung. Pemilikan lahan oleh *absentee* baik oleh perusahaan swasta maupun perorangan bukan merupakan gejala baru dan sudah terjadi sejak tahun 1980an.

Pengelolaan lahan milik *absentee* di Cisari diberikan kepada petani penggarap dengan sistem bagi hasil. Lebih dari 50% petani lokal di Cisari merupakan buruh tani tak bertanah dan petani penggarap.

Pemilikan Lahan oleh Absentee

Kasus I

PT. Xanadu memiliki lahan pertanian yang seluas 35 ha di Cisari sejak tahun 1982. Lahan tersebut dijadikan perkebunan buah lokal yang kemudian mengalami kerugian pada tahun 1997/1998. Saat ini digarap oleh petani lokal sebagai sawah pompanisasi.

Lahan perkebunan diubah menjadi sawah pompanisasi seluas 30 ha atas permintaan warga sekitar. Seluas 3 ha lainnya ditanami palawija berupa kacang-kacangan. Sawah ini mampu menghasilkan panen dua kali dalam satu tahun. Terdapat 40 orang warga sekitar yang menjadi petani penggarap pada lahan tersebut. Penggarap membayar sewa tanah pada saat panen tiba. Penggarap harus bersedia menghentikan usaha tani pada saat perusahaan akan mempergunakannya. Pihak perusahaan rencananya akan membangun perumahan pada lokasi tersebut.

Kasus II

PT. Sosro memiliki tanah seluas 20 ha di Dusun Cirejag II, Cisari yang dijadikan sawah pompanisasi. Pengelolanya dengan sistem bagi hasil pada saat panen. Kedua perusahaan ini masih rutin membayar pajak per tahun kepada Pemerintah Desa (Iuran Rutin Tahunan Desa/IRTD) sebesar Rp 350.000 per ha.

Gejala pemilikan tanah oleh *absentee* tidak terjadi pada desa di Jawa Tengah dan sebagian desa di Jawa Barat (Karang, Wanakerta). Tanah pertanian di Jawa Tengah tergolong masih luas dibandingkan di Jawa Barat. Petani lokal rata-rata memiliki lahan kurang dari 0,5 ha. Pemilikan tanah ini tidak hanya oleh orang dari dalam desa saja karena maraknya pemekaran desa-desa di Jawa Tengah (pemekaran tersebut bisa membuat seorang menjadi ‘absentee’ secara formal tetapi bukan dalam arti sebenarnya).

Pemdes Sidosari, Jawa Tengah telah berusaha membatasi akumulasi dan polarisasi pemilikan tanah melalui kesepakatan informal dengan warga desa (lihat box).

Usaha Pemerintah Desa untuk Membatasi Konsentrasi Luas Pemilikan

Di Sidosari, Kabupaten Kebumen, terdapat salah seorang pemilik tanah luas mencapai hampir 5 ha. Lokasinya tersebar di dalam dan di luar desa. Pada tahun 1957, ia berhasil membeli sawah seluas 10 ubin (140 m²) dan bertambah luas pada tahun-tahun selanjutnya. Ia juga seorang rentenir yang memberikan jasa pinjaman uang. Ia juga sering memberikan pinjaman uang kepada petani lain dalam bentuk gadai sawah. Ia lebih banyak meminta surat tanah sebagai borag (jaminan). Banyak petani yang menggadaikan tanah kepadanya harus kehilangan tanah karena tidak mampu mengembalikan uang pinjaman. “Jadi warga banyak yang takut kalau borag itu nantinya jadi miliknya.”

Warga desa menganggap bahwa tanah yang ia miliki sudah cukup luas sehingga perlu dibatasi kepemilikan dan merasa khawatir jika sebagian besar sawah di desa menjadi miliknya. Oleh karena itu, Pemdes dan warga sepakat untuk tidak menjual tanah kepadanya sehingga muncul istilah “susah membeli sawah di desa” sebagai julukan. Petani yang membutuhkan modal kemudian dapat mengakses pinjaman ke Bank Kredit Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dengan pendampingan dari BRI sebagai salah satu alternatif. Terdapat skema pinjaman BKD dengan sistem pembayaran paska panen.

Penguasa Tanah Luas di Desa: Keturunan Tuan Tanah dan Orang Kaya Baru

Dawungan, tanah pertanian yang luas mayoritas dikuasai oleh para haji dan tuan tanah. Mereka mengakumulasi tanah dengan cara membeli atau gadai. Gadai yang tidak ditebus akan menjadi hak milik sesuai kesepakatan.

Penguasa lahan luas di Wanakerta dan Parangputih juga berasal dari kelompok ekonomi baru seperti dari keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Indonesia/Wanita (TKI/W). Di Wanakerta, hampir separuh pemuda laki-laki dan perempuan di Wanakerta bekerja sebagai TKW dan TKI. Pendapatan TKI/W biasanya digunakan untuk membangun dan merenovasi rumah tinggal mereka di desa dan membayar hutang. Setelah itu, sebagian mereka menggunakan pendapatan untuk menyewa atau membeli tanah di desa sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi keluarga di desa. Pembelian tanah oleh para TKI/W banyak dilakukan pada saat krisis moneter karena nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar pada saat itu sedang menurun. Saat ini, TKI/W kesulitan untuk membeli tanah karena harga tanah yang tinggi.

Seperti telah diuraikan diatas, pemilikan lahan luas di semua desa penelitian tidak menimbulkan pola usaha tani skala luas. Petani pemilik lahan luas pada umumnya banyak menghabiskan waktu mereka untuk berbagai kegiatan non pertanian sehingga tidak tertarik untuk bertani sendiri. Mereka ada yang menduduki jabatan pada pemerintahan desa dan mengelola usaha perdagangan atau jasa di sektor hulu hilir non pertanian. Pemilikan tanah luas pada desa-desa di Jawa Barat dan Jawa Tengah banyak yang digarapkan kepada petani lain.

Penguasaan Sektor Non Pertanian

Sektor non pertanian pada desa-desa penelitian diminati oleh semua strata RTP, tetapi jenis keterlibatan dan tingkat penghasilan non pertanian tergantung pada berbagai faktor antara lain ketersediaan modal, tingkat pendidikan, dan gender. Buruh tani tak bertanah memiliki kesempatan lebih untuk menambah penghasilan dari sektor non pertanian dengan melakukan berbagai pekerjaan yang tersedia di desa, seperti menjadi buruh pabrik, buruh bangunan, buruh cuci, buruh pada industri makanan kecil dan kerajinan, serta buruh tambang pasir besi. Total pendapatan mereka dapat lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang mengelola lahan sempit.

Penguasaan sektor non pertanian oleh penguasa tanah luas sangat terlihat di beberapa desa di Sulawesi Selatan. Terdapat kecenderungan monopoli oleh penguasa lahan luas di desa Cempaka, Parangputih, dan Walian. Akumulasi modal pada sektor non pertanian padi dilakukan pada perkebunan, peternakan, perdagangan, dan jasa hulu hilir pertanian padi. Pemilik lahan luas di desa-desa Sulawesi Selatan juga merupakan tengkulak, pemilik penggilingan beras, pemilik toko saprodi, pemilik toko sembako, juragan tenun, pemilik traktor tangan, dan pemilik *combine harvester*. *Combine harvester* disewakan kepada petani lainnya dan cenderung mengurangi kesempatan kerja buruh tani pada saat panen.

Penguasaan Lahan Kecil dan Buruh Tani Tak Bertanah

Petani sempit (gurem) dijumpai dalam jumlah yang besar di banyak desa penelitian. Di Jawa Barat, persentase petani penggarap murni dan buruh tani tak bertanah paling banyak ($36 + 40 = 76\%$) di Cisari (Tabel 4). Hal ini terkait sebagian besar lahan sudah dikuasai oleh *absentee*. Sementara di Sulawesi Selatan, buruh tani tak bertanah sangat sedikit jumlahnya karena hampir semua memiliki kesempatan melakukan usaha tani sendiri.

Jumlah buruh tani di sebagian besar desa penelitian cenderung mengalami peningkatan. Penyebab terbesarnya karena penguasaan tanah luas mulai bergeser kepada beberapa orang saja. Bahkan, peningkatan jumlah ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja di sektor pertanian. Di Wanakerta, kesempatan kerja buruh tani menjadi berkurang karena pemilik tanah mulai menerapkan cara baru dalam pengelolaan usaha tani mereka. Mereka lebih memilih menggunakan satu atau dua orang kepercayaan untuk mengelola keseluruhan proses produksi, selain panen. Sebaliknya, jumlah buruh tani tak bertanah di Cisari semakin menurun dari tahun ke tahun. Banyak generasi muda berpindah ke sektor non pertanian, sebagai buruh pabrik. Permintaan buruh tani banyak dipenuhi oleh buruh tani dari luar desa.

Pola ini berbeda dengan yang terjadi pada desa-desa di Indramayu karena pertanian masih menjadi sektor ekonomi utama. Sebagian besar anggota rumah tangga buruh tani tak bertanah di Karang dan Wanakerta ada yang bekerja sebagai TKI/TKW di luar negeri. Pendapatan dari TKI/TKW menyumbang akumulasi modal rumah tangga mereka di desa. Bahkan, terdapat rumah tangga buruh tani tak bertanah berhasil menyewa atau membeli tanah pertanian sehingga stratanya menjadi meningkat sebagai petani lahan sempit.

Penguasaan Tanah: Mekanisme, Hubungan Kerja, serta Akses berdasar Gender dan Generasi

Mekanisme dan Hubungan Kerja pada Penguasaan Tanah

Warisan

Seperti dapat diduga, penguasaan tanah berdasarkan hak waris cukup banyak ditemukan di semua desa penelitian. Biasanya hak waris atas tanah diturunkan kepada anak setelah orang tua meninggal. Pada saat orang tua sebagai pemilik tanah masih hidup, biasanya anak hanya membantu proses produksi.

Anak yang sudah menikah dianggap belum memiliki otoritas penuh terhadap produksi padi. Orang tua khawatir jika tanah yang diberikan akan dijual tanpa izin karena anak dianggap belum sepenuhnya mengerti pengelolaan usaha tani padi. Orang tua akan turut menentukan waktu tanam dan panen pada tanah yang masih menjadi miliknya, termasuk juga jenis komoditas yang akan ditanam. Tanaman nonpadi dapat menjadi pilihan komoditas yang dianggap lebih menguntungkan.

Membeli

Mekanisme ini biasanya dilakukan oleh petani kaya yang memiliki penghasilan besar baik dari sektor pertanian (padi-nonpadi) maupun non pertanian, seperti PNS, TNI/POLRI, TKI/TKW, perdagangan, dan jasa hulu hilir pertanian padi.

Harga tanah di desa-desa penelitian tergantung pada beberapa kriteria. Kualitas pengairan dan lokasi merupakan aspek yang mempengaruhi harga tanah. Pada 3-10 tahun terakhir terjadi peningkatan harga tanah yang cukup pesat pada beberapa desa, terutama di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Kenaikan Harga Tanah Pertanian

Kasus I

Seperti yang terjadi di Karang, Indramayu, harga tanah dalam 10 tahun terakhir mengalami peningkatan hingga 10 kali lipat. Pada tahun 2002 harga tanah berkisar antara Rp 5.000 - Rp 10.000/m², sedangkan pada akhir tahun 2013 harga tanah mencapai 100 ribu/m². Perubahan harga ini salah satunya dipengaruhi oleh pembangunan PLTU Pertamina dan pembangunan infrastruktur jalan di sekitar tanah pertanian.

Kasus II

Di Wetanan, Cilacap, peningkatan harga tanah dari tahun 2008-2013 meningkat 2 kali lipat. Tahun 2013 harga tanah berkisar antara 50 ribu hingga 100 ribu/m². Salah satu penyebabnya adalah maraknya pembelian tanah oleh warga dari luar desa.

Sewa

Petani yang memiliki modal (kaya) dapat memanfaatkan sistem sewa untuk mengakses tanah. Pemilik tanah mendapatkan uang sewa di awal tanpa menanggung resiko produksi. Jangka waktu sewa tanah yang berlaku pada umumnya 1-2 tahun. Harga sewa tanah yang tinggi mendorong petani pemilik lahan luas memilih menyewakan sebagian tanah dibandingkan harus mengelola seluruhnya. Semua biaya dan resiko produksi dialihkan kepada petani penyewa. Selain itu, uang yang diterima oleh pemilik tanah dapat digunakan sebagai modal usaha, untuk keberangkatan anak mereka menjadi TKI/TKW ke luar negeri, atau untuk mengatasi krisis keuangan rumah tangga. Sementara, petani penggarap dan buruh tani tak bertanah yang tidak memiliki cukup modal tetap tidak memiliki akses tanah melalui sistem sewa.

Di Sidosari, tanah kemakmuran dan *bengkok*¹⁷ desa disewakan kepada petani tak bertanah dan petani lahan sempit yang berasal dari dalam desa. sebagai salah satu strategi Pemdes untuk mempertahankan lahan milik desa agar tidak dibeli oleh pemodal-pemodal di luar desa. Selain itu, lelang tanah dilakukan sebagai upaya distribusi tanah kepada petani lahan sempit dan atau petani tak berlahan.

¹⁷ Bengkok merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tanah kas milik desa.

Strategi Mempertahankan Lahan Milik Desa

Harga sewa tanah kemakmuran dan bengkak di Sidosari bervariasi tergantung pada tingkat kesuburan dan lokasi tanah, mulai dari satu juta hingga 15 juta/ha per tahun. Sawah bengkak ini dapat dikelola oleh setiap warga (KK) desa dengan cara undian lelang. Warga yang mendapatkan nomer undian kemudian menyelesaikan administrasi dan pembayaran kepada Pemerintah Desa. Pembayaran sewa dapat juga dilakukan berkala selama 3 bulan dari tanggal penetapan undian.

Gadai

Sistem gadai pada umumnya menggunakan periode tahunan selama 1-3 tahun. Harga gadai sangat bervariasi tergantung kesepakatan antara pemilik tanah dan penggadai. Pemilik tanah tidak memiliki hak atas tanahnya selama masa gadai. Tanah gadai dapat disewakan atau dikelola secara bagi hasil kepada petani lain oleh penggadai selama masa gadai.

Tidak ada bunga dalam pengembalian uang pinjaman. Hasil panen sepenuhnya menjadi hak penggadai dan dianggap sebagai bunga pinjaman bagi penggadai. Namun, di Jawa Tengah sudah mulai menerapkan sistem bunga sebesar 20% dari total pinjaman. Selain itu, sistem gadai tanah ada yang menggunakan perhitungan harga beras.

Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan sistem penguasaan tanah yang paling banyak terjadi di semua desa penelitian. Hubungan pemilik-penggarap merupakan bentuk hubungan kerja agraris yang dominan setelah hubungan buruh tani dengan petani majikan. Mekanisme peralihan surplus melalui hubungan bagi hasil terjadi di sebagian besar desa penelitian dan jauh lebih penting dibandingkan sewa atau gadai. Dalam sistem ini, penggarap sering menanggung resiko produksi yang lebih besar daripada pemilik tanah.

Terdapat dua sistem bagi hasil yang biasa diterapkan, yaitu bagi dua (*maro*) dan bagi tiga (*mertelu*). *Maro* lebih banyak diterapkan dibandingkan dengan *mertelu*. *Maro* merupakan bagi hasil dimana pemilik tanah mendapatkan separuh dari hasil panen yang sudah dikurangi dengan biaya produksi dan upah bawon. Pemilik tanah akan menanggung separuh total biaya pupuk dan pestisida.

Pada sistem *mertelu* hampir semua biaya produksi menjadi ditanggung penggarap. Penggarap menanggung biaya pengolahan lahan, tenaga kerja, pupuk, dan pestisida. Pemilik tanah hanya menanggung biaya benih dan biaya herbisida. Jika terjadi gagal panen, penggarap harus menanggung semua resiko produksi.

Seperti dilihat pada Tabel 4 di atas, di setiap desa penelitian terdapat proporsi signifikan petani penggarap yang tidak memiliki sendiri lahan mereka. Proporsi petani pemilik-penggarap juga menunjukkan jumlah yang besar. Di Walian, jumlah petani bukan pemilik melebihi jumlah petani pemilik dan juga melebihi jumlah buruh tani. Ini berarti pola hubungan pemilik-*pemaro* mulai menunjukkan hubungan yang dominan dalam struktur agraris desa, dengan berbagai implikasi negatif untuk *social efficiency*. Pemilikan tanah luas pada gilirannya menimbulkan perluasan sistem pertanian skala kecil atas dasar *share-cropping*.

Akses Tanah Berdasarkan Generasi dan Gender

Salah satu akses tanah oleh generasi muda adalah dengan cara warisan. Orangtua akan membagi waris tanah sesuai dengan jumlah anak dalam rumah tangga. Namun, warisan di beberapa desa di Jawa Tengah mempunyai cara bagi waris yang berbeda.¹⁸ Anak laki-laki akan mendapatkan warisan tanah yang lebih luas. Salah satu anak perempuan akan mendapatkan warisan berupa rumah. Sementara, anak perempuan lainnya mendapatkan warisan tanah yang lebih sempit.

Keterbatasan akses tanah oleh generasi muda pada rumah tangga Petani Sempit menyebabkan mereka beralih ke sektor non pertanian baik di dalam maupun di luar desa. Akan tetapi, keputusan generasi muda untuk bertani atau tidak, bermigrasi atau tidak, dsb bukan selalu sebagai keputusan mereka seumur hidup. Banyak pemuda perempuan maupun laki-laki melakukan migrasi dan tidak jarang memiliki cita-cita menabung hingga mampu membeli tanah pertanian dan kembali ke desa.¹⁹

HUBUNGAN TIMBAL-BALIK ANTARA KETIMPANGAN DI SEKTOR PERTANIAN DAN NON PERTANIAN

Hubungan antara luas tanah dengan akumulasi pendapatan pada RTP sudah mulai mengalami perubahan jika dibandingkan dengan ‘pola klasik’. Dalam pola klasik seperti pada penelitian Wiradi dan White (1989) sebelumnya, pendapatan non pertanian cenderung

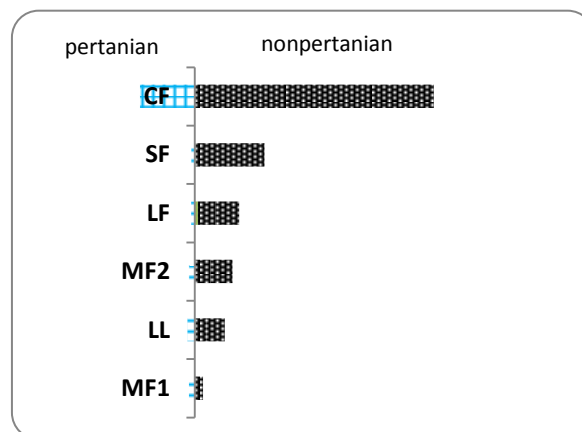
¹⁸ Pembagian warisan disesuaikan dengan ‘hukum islam’ dimana laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar.

¹⁹ Analisis dan pembahasan lebih rinci tentang generasi muda perdesaan, akses tanah mereka serta preferensi kerja, dapat dibaca dalam artikel “*Menguak Realitas Generasi Muda Sektor Pertanian di Perdesaan*” dalam edisi JAS ini (Herawati dan Nugraha, 2015).

berbanding lurus dengan penguasaan tanah. Saat ini total pendapatan RTP tidak selalu ditentukan oleh luas penguasaan tanah. Berdasarkan perincian total pendapatan RTP antara sektor pertanian dan non pertanian, dapat dilihat pola struktur agraris.

Berikut adalah grafik total pendapatan pertanian dan non pertanian berdasarkan strata penguasaan tanah pada masing-masing desa. Desa Cisari (Grafik pertama dibawah) memiliki pola struktur agraris (pertanian dan non pertanian) yang berbeda dengan desa lainnya. Pada saat penelitian berlangsung, pendapatan sektor pertanian pada semua strata RTP di Cisari sangat rendah karena serangan hama penggerek batang yang tidak bisa dihindari selama 2 tahun terakhir.

Grafik 1. Grafik Total Pendapatan Rumah Tangga Petani Cisari, Menurut Strata Penguasaan Lahan²⁰



Sumber: olahan data survey rumah tangga petani, 2013

Keterangan:

Petani Modal Kuat (CF), Petani Luas (LF), Petani Menengah I (MF1), Petani Menengah II (MF2), Petani Sempit (SF), dan Buruh Tani tak Bertanah (LL).²¹

Buruh tani tak bertanah di Cisari mempunyai total pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Petani Menengah I. Mereka memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan pekerjaan lain di luar pertanian. Pekerjaan di sektor non pertanian yang paling dominan di desa ini adalah buruh pabrik. Hampir semua warga desa (termasuk generasi

²⁰ Grafik menunjukkan total pendapatan dalam kondisi gagal panen. Urutan total pendapatan berdasarkan strata pada kondisi normal (tanpa serangan hama) adalah CF, LF, SF, MF2, LL, dan MF1.

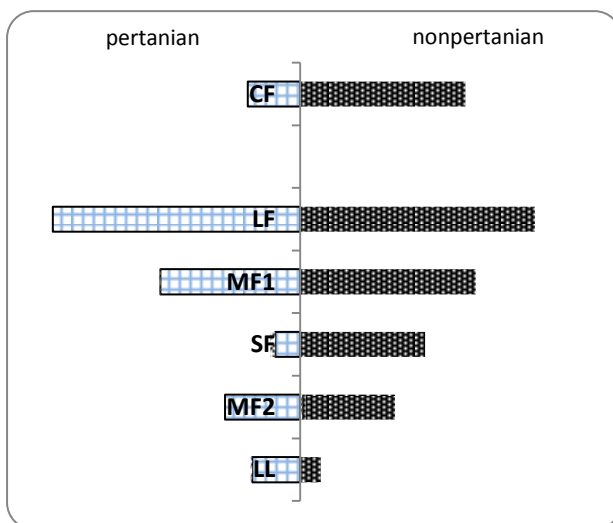
²¹ Keterangan ini berlaku untuk semua grafik total pendapatan rumah tangga petani dalam paper ini.

muda) bekerja sebagai buruh pabrik. Upah sebagai buruh pabrik berkisar antara 2 juta hingga 4 juta rupiah sebulan. Ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan dengan upah yang lebih tinggi dari buruh tani, yaitu 90 ribu hingga 100 ribu rupiah per hari. Upah buruh tani di Cisari berkisar 30 ribu hingga 60 ribu rupiah per hari.

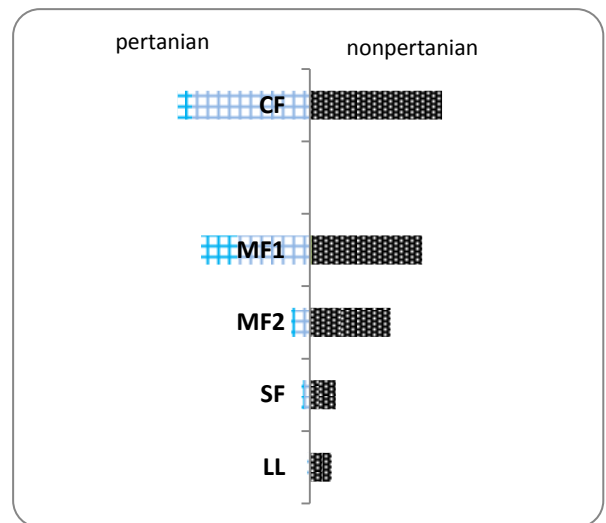
Petani Sempit di Cisari juga memiliki keberagaman sumber pendapatan non pertanian. Mereka bekerja sebagai buruh pabrik, pedagang, dan pekerjaan serabutan. Pendapatan mereka lebih tinggi dibandingkan Petani Luas, dikarenakan mereka tidak memiliki keberagaman sumber pendapatan. Mereka lebih banyak mengandalkan pada usaha tani luas atau sebagai PNS. Sementara Petani Modal Kuat di Cisari memiliki pendapatan yang paling besar dibandingkan strata lain. Petani Pemilik Modal di desa ini mengelola usaha tani yang luas, tengkulak gabah, dan pemilik pabrik batu bata dengan 10 orang tenaga kerja.

Pola struktur agraris di Dawungan dan Mulyoharjo mendekati pola struktur agraris 'klasik'. Berikut adalah grafik kedua desa tersebut:

Grafik 2 Dawungan



Grafik 3 Mulyoharjo



Sumber: Olahan data survey rumah tangga petani, 2013

Sektor pertanian masih menjadi sumber pendapatan yang utama bagi warga desa di Dawungan. Buruh tani tak bertanah (LL) sangat bergantung pada sektor pertanian karena keterbatasan modal yang mereka miliki. Banyak generasi muda laki-laki dan perempuan dari strata Petani Sempit (SF) di Dawungan yang bekerja sebagai TKI/TKW sehingga pendapatan

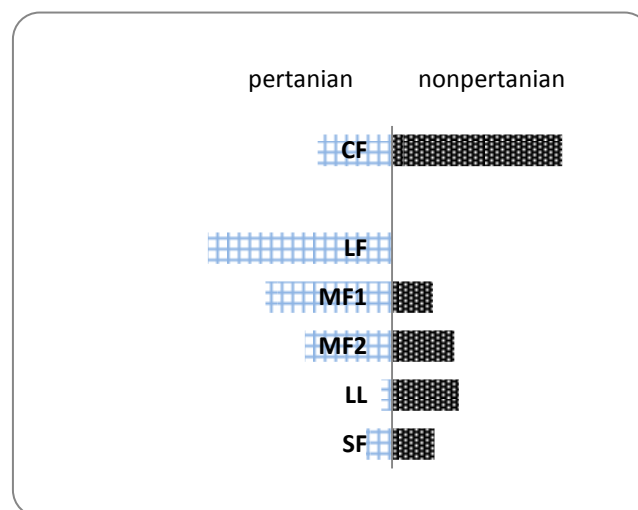
mempengaruhi total pendapatan rumah tangga. Kiriman dari para TKI/TKW membuat total pendapatan mereka lebih tinggi dibandingkan dengan MF2.

Petani Modal Kuat di Dawungan memiliki total pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan Petani Luas dan Petani Menengah. CF di Dawungan adalah seorang tengkulak yang membeli gabah dari petani-petani di desa. Pendapatannya menurun karena dalam satu tahun terakhir terjadi gagal panen di desa sehingga mempengaruhi total pendapatan sektor pertaniannya.

Sementara di Mulyoharjo, CF merupakan ketua Poktan yang menguasai usaha tani luas tidak melakukan akumulasi pada sektor non pertanian karena usianya sudah tua. Buruh tani tak bertanah di desa ini pada umumnya juga sebagai buruh serabutan. Di sektor pertanian, mereka sangat tergantung dari banyaknya permintaan kerja para pengelola usaha tani.

Struktur agraris di Sidosari menunjukkan pola yang lebih mirip dengan pola struktur agraris di Taiwan, seperti terlihat pada grafik di bawah.

Grafik 4 Sidosari



Sumber: olahan data survey rumah tangga petani, 2013

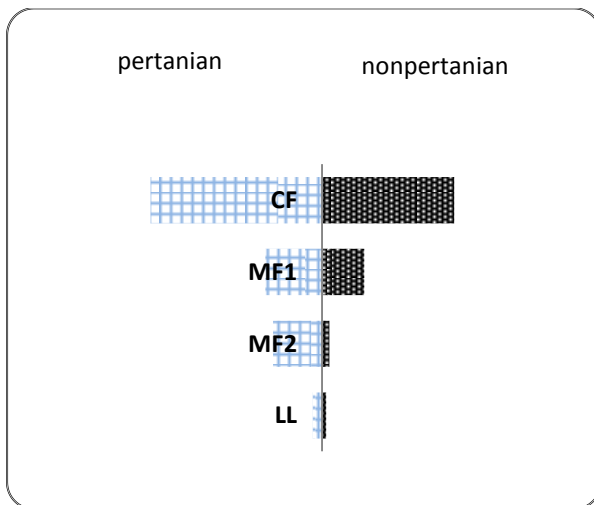
Struktur penguasaan lahan di Sidosari, Kebumen memiliki sifat yang berbeda dengan desa-desa penelitian lainnya. Pendapatan Petani Modal Kuat di sektor non pertanian lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian. Petani Sedang I dan II mempunyai berbagai sumber pendapatan di sektor non pertanian. Akumulasi modal dari sektor non pertanian

digunakan untuk menyewa dan membeli tanah. Kebanyakan dari mereka lebih fokus mengerjakan kegiatan di sektor non pertanian sebagai PNS, buruh bangunan, dan pengrajin caping sehingga lebih memilih menggunakan buruh tani harian untuk mengerjakan tahapan proses produksi.

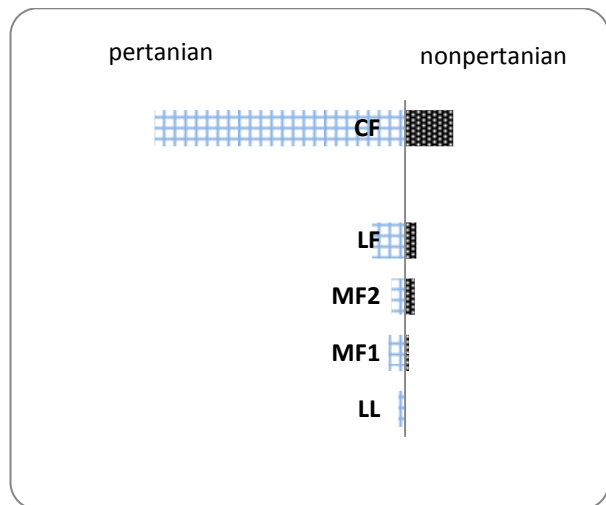
Total pendapatan buruh tani tak bertanah di Sidosari justru lebih besar dibandingkan dengan petani pemilik lahan kecil. Mereka mengerjakan lebih banyak pekerjaan serabutan di sektor non pertanian. Pendapatan di sektor pertanian sangat rendah dibandingkan strata yang lain karena mereka hanya mengerjakan beberapa tahapan kerja sesuai permintaan. Sedangkan Petani Sempit banyak yang mengelola usaha tani dengan menyewa tanah. Mereka memanfaatkan tanah sewa untuk ditanami kacang hijau. Mereka juga bekerja sebagai buruh tani pada saat musim tanam dan panen.

Selain pola-pola struktur agraris di atas, terdapat tiga desa di Sulawesi Selatan yaitu Cempaka, Walian, dan Parangputih yang menunjukkan monopoli pendapatan oleh Petani Pemilik Modal (lihat Grafik 5 s/d 7 berikut):

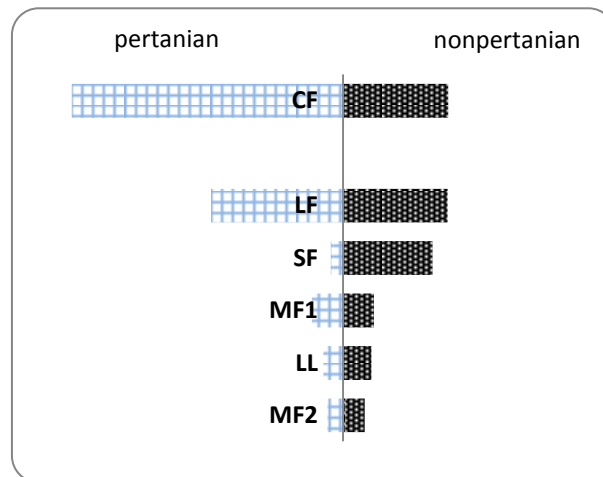
Grafik 5 Cempaka



Grafik 6 Walian



Grafik 7 Parangputih

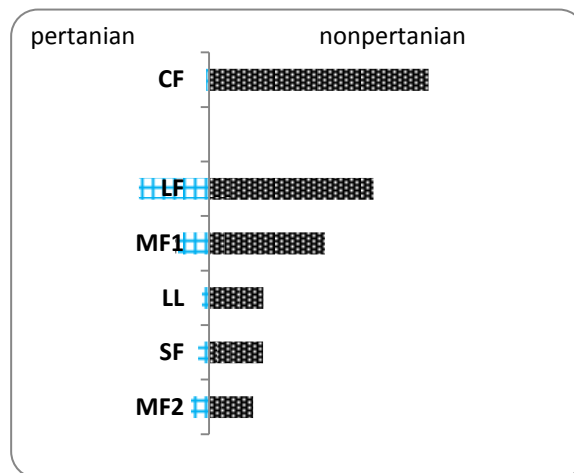


Sumber: olahan data survey rumah tangga petani, 2013

Pola relasi total pendapatan sektor pertanian dan non pertanian pada sebagian besar desa di Sulawesi Selatan yaitu Cempaka, Parangputih, dan Walian menunjukkan monopoli oleh petani modal kuat di desa. Mereka berasal dari keluarga petani kaya pemilik tanah luas, para *datuk* keturunan bangsawan, para PNS, dan pemilik *combine harvester*. Petani sempit dan buruh tani tak bertanah banyak yang bekerja menjadi buruh tani dan karyawan *combine harvester* pada Petani Modal Kuat.

Desa-desa lain dalam penelitian ini memiliki pola grafik total pendapatan RTP yang beragam. Desa tersebut adalah Sarimulyo dan Wetanan di Jawa Tengah, Wanakerta dan Karang di Jawa Tengah, dan Gadingan di Sulawesi Selatan. Grafik di bawah menunjukkan masing-masing pola yang terjadi pada kelima desa tersebut.

Grafik 8 Sarimulyo



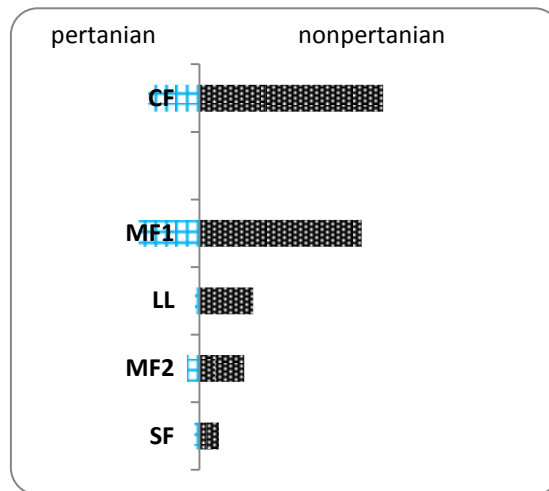
Sumber: olahan data survey rumah tangga petani, 2013

Pendapatan sektor pertanian pada strata Petani Modal Kuat di Sarimulyo sangat kecil karena dikelola di atas tanah sempit dan hanya bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pangan rumah tangga. Petani Modal Kuat ini lebih mengutamakan sumber penghasilan dari sektor jasa pertanian padi, sebagai tengkulak. Pada strata Petani Luas masih banyak yang mengandalkan penghasilan pada sektor pertanian padi. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian padi sebagian digunakan untuk membiayai anak mereka berangkat menjadi TKI/TKW ke luar negeri.

Anggota RTP buruh tani tak bertanah di Sarimulyo banyak juga yang menjadi TKI/TKW. Buruh tani tak bertanah ini memiliki beragam pekerjaan di sektor non pertanian yang dapat dilakukan di luar musim sibuk pertanian padi. Mereka menjadi penyadap nira kelapa, buruh bangunan, dan pemulung. Total pendapatan mereka lebih tinggi dibandingkan strata Petani Sempit dan Petani Menengah 2 yang rata-rata usia mereka sudah tua sehingga sudah tidak produktif.

Pola relasi pendapatan pertanian dan non pertanian di Wetanan terlihat seperti grafik di bawah.

Grafik 9 Wetanan



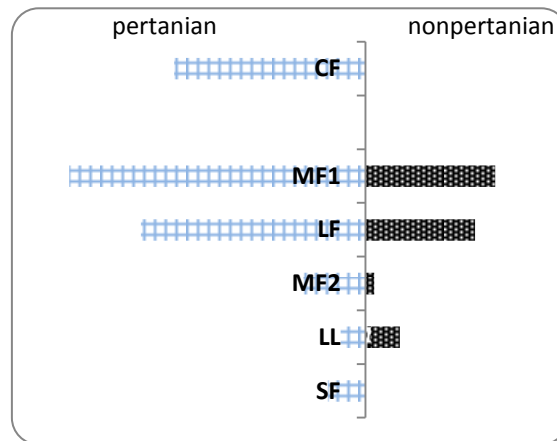
Sumber: olahan data survey rumah tangga petani, 2013

Petani Pemilik Modal Kuat di Wetanan mempunyai pendapatan dari sektor pertanian dan non pertanian yang tinggi. Pada sektor non pertanian, petani strata ini menguasai penggilingan padi di desa. Buruh tani tak bertanah di desa ini memiliki total pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan Petani Sempit dan Petani Menengah. Hal ini dikarenakan banyak anggota RTP buruh tani yang bekerja sebagai TKI/TKW di Korea. Buruh tani ini lebih banyak memiliki waktu luang untuk bekerja di sektor non pertanian karena tidak mengelola usaha tani sendiri. Pekerjaan mereka antara lain menjadi penambang pasir besi dengan pendapatan mencapai Rp 100 ribu dalam satu hari bekerja.

Di Desa Wanakerta, pola relasi pendapatan dalam masing-masing RTP digambarkan dalam grafik berikut:²²

²² Total pendapatan pada strata petani CF tidak menunjukkan total pendapatan sebenarnya. Terdapat sumber pendapatan di sektor nonpertanian yang tidak sempat tergalai oleh peneliti.

Grafik 10 Wanakerta

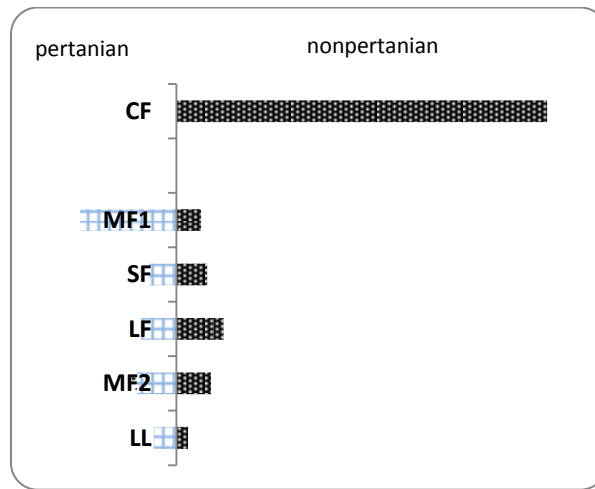


Sumber: olahan data survey rumah tangga petani, 2013

Total pendapatan RTP di Wanakerta yang paling tinggi adalah pada strata Petani Menengah I. Pendapatan Petani Menengah I pada sektor pertanian padi cukup tinggi karena produktivitas tanah yang baik. Petani pada strata ini memiliki perhatian yang baik terhadap usaha tani mereka karena kebanyakan mereka mengelola usaha tani di atas tanah sewaan. Harga sewa tanah yang tinggi memaksa mereka melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan produktivitas tanahnya. Pekerjaan di sektor non pertanian dalam strata ini antara lain memiliki usaha produksi batu bata. Skala produksi batu bata yang dikelola tidak besar namun menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi RTP pada strata ini.

Pola relasi total pendapatan RTP di Karang tergambar seperti grafik di bawah:

Grafik 11 Karang

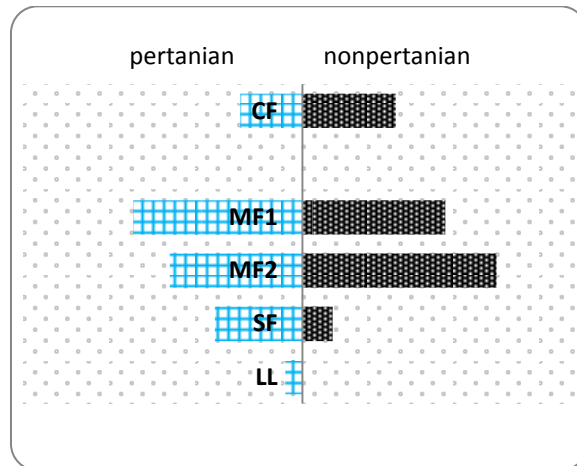


Sumber: olahan data survey rumah tangga petani, 2013

Pemilik Modal di Karang tidak mengelola usaha tani padi maupun non padi. Total pendapatannya yang besar seluruhnya berasal dari usaha penggilingan padi dan menjadi tengkulak. Hampir semua petani di desa ini menjual dan menggiling padi kepadanya. Total pendapatan Pemilik Modal sangat jauh berbeda dengan buruh tani tak bertanah di Karang. Pendapatan buruh tani tak bertanah baik dari sektor pertanian dan sektor non pertanian sama rendahnya. Pekerjaan di sektor non pertanian di desa ini sangat terbatas. Buruh tani hanya bekerja sesuai permintaan Petani Luas atau Menengah di desa dan jumlahnya tidak menentu.

Pada strata Petani Sempit banyak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai TKI/TKW di luar negeri. Mereka yang bekerja menjadi TKI/TKW mengirimkan uang kepada keluarga di desa sehingga mempengaruhi total pendapatan rumah tangga Petani Sempit. Uang yang dikirimkan kepada keluarga di desa jumlahnya cukup banyak, yaitu sekitar 1 juta hingga 2 juta per bulan. Total pendapatan rumah tangga Petani Sempit yang menerima kiriman dapat lebih tinggi daripada Petani Sedang. Berikut adalah grafik pola relasi pendapatan RTP di Desa Gadingan:

Grafik 12 Gadingan



Sumber: olahan data survey rumah tangga petani, 2013

Pola relasi pendapatan dari sektor pertanian padi dan nonpertanian padi di Gadingan memiliki sedikit kemiripan dengan ‘pola klasik’ hanya saja penguasaan tanah di desa ini relatif merata. Buruh tani tak bertanah sangat jarang ditemukan dan mengelola usaha tani pada tanah yang sempit. Buruh tani akan banyak terlibat pada saat panen tiba. Upah sebagai buruh panen hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga.

KESIMPULAN

Secara umum, temuan lapangan pada penelitian ini sesuai dengan data BPS tahun 1983-2003 yang menunjukkan penurunan jumlah petani penggarap murni dan meningkatnya jumlah buruh tani tak bertanah. Rata-rata penguasaan tanah di seluruh desa berada pada sebagian kecil petani saja. Distribusi tanah yang tidak merata di beberapa desa sudah mengkhawatirkan dari segi efisiensi sosial. Investasi akumulasi tanah mengarah kepada akumulasi modal bagi pemilik tanah luas yang 'hanya duduk manis' tidak melakukan proses produksi. Terjadi peralihan hasil dari petani penggarap yang melakukan proses produksi kepada pemilik tanah luas.

Gejala pemilikan dan penguasaan tanah oleh *absentee* mulai signifikan dan mengarah kepada polarisasi sehingga mengakibatkan pola usaha tani skala kecil merata namun ketimpangan distribusi masih tetap ada. Sementara penguasaan tanah di hampir semua desa berada pada petani yang berasal dari keturunan petani pemilik tanah luas (tuan tanah). Namun, keadaan ini mulai bergeser karena orang kaya baru di desa telah berhasil menguasai tanah melalui akumulasi modal non pertanian.

Sistem bagi hasil merupakan sistem penguasaan tanah yang paling banyak ditemukan pada desa-desa penelitian. Hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarap merupakan hubungan kerja agraris yang dominan disamping hubungan kerja buruh tani dengan petani majikan. Di kebanyakan desa penelitian, hubungan bagi hasil merupakan hubungan agraris dan mekanisme peralihan surplus yang lebih penting dibandingkan sewa atau gadai.

Akses tanah oleh perempuan di desa masih sangat terbatas. Bagi waris berupa tanah lebih banyak diberikan kepada laki-laki. Mayoritas akses tanah oleh generasi muda laki-laki akan diperoleh pada saat orang tua mereka telah meninggal (warisan). Selama menunggu warisan tanah, generasi muda akan memilih pekerjaan pada sektor non pertanian baik di dalam maupun luar desa.

Akumulasi modal RTP tidak selalu ditentukan oleh luas penguasaan tanah. Pilihan pekerjaan di sektor non pertanian turut menentukan total pendapatan rumah tangga. Terdapat kecenderungan monopoli pendapatan pada desa yang terjadi ketimpangan distribusi tanah yang tajam.

Daftar Rujukan

- Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi. 2011. *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: ARC. Bina Desa dan KPA.
- Bernstein. H. 2010. *Class Dynamics of Agrarian Change*. Halifax: Fernwood Publishing; VA: Kumarian Press.
- BPS. 2003. Sensus Pertanian 2003: Angka Propinsi Hasil Pendaftaran Rumah Tangga (Angka Sementara). Jakarta:BPS.
- BPS. 2013. Sensus Pertanian 2003: Angka Propinsi Hasil Pendaftaran Rumah Tangga (Angka Sementara). Jakarta:BPS.
- de Koninck, R.J. Rigg & P. Vandergeest. 2012. 'A half century of agrarian transformations in Southeast Asia, 1960-2010'. in J. Rigg & P. Vandergeest eds *Revisiting Rural Places: Pathways to Poverty and Prosperity in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press. pp. 25-37.
- Lipton, M. 2009. *Land Reform in Developing Countries: Property Rights and Property Wrongs*. New York: Routledge.Peluso, N.L. dan J.C. Ribot (2003) 'A theory of access'. *Rural Sociology* 68 (2): 153-181.
- Rigg, J. And P. Vandergeest (eds.). 2012. *Revisiting Rural Places. Pathways to Poverty and Prosperity in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press.
- van der Ploeg, J.D. 2013. *The Art of Peasant Farming: a Chayanovian Manifesto*. Halifax: Fernwood Press.
- White. B. 1989. 'Problems in the empirical analysis of agrarian differentiation'. in G. Hart. A. Turton and B. White (eds) *Agrarian Transformations: Lokal Processes and the State in Southeast Asia*. Berkeley: University of California Press. pp. 15-30.
- White. B. dan Gunawan Wiradi. 1989 'Agrarian and non-agrarian bases of inequality in nine Javanese villages' G. Hart. A. Turton and B. White (eds) *Agrarian Transformations: Lokal Processes and the State in Southeast Asia*. Berkeley: University of California Press. pp. 266-302. Diterbitkan kembali dalam Gunawan Wiradi et al. (2009) *Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*. Yogyakarta: STPN. pp. 296-344.